



BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2017

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA HIBAH

DASAR

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;

DASAR

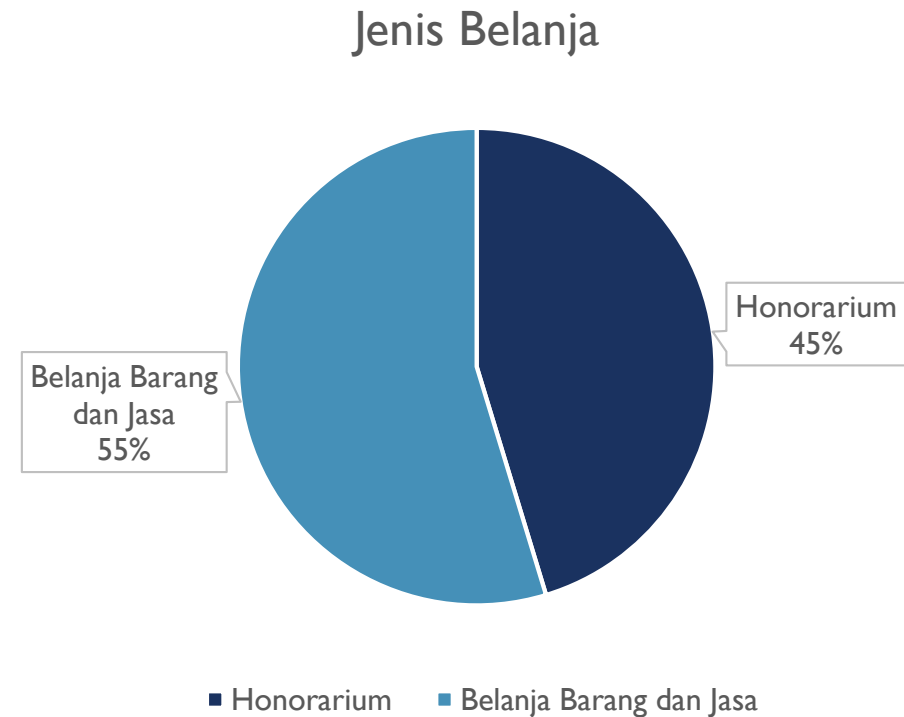
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- **Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270.4/32/03/TAHUN 2016 dan 014/Bawaslu-Prov.JT-07/HK.02/VI/2016 Tanggal 27 Juni 2016;**



ANGGARAN

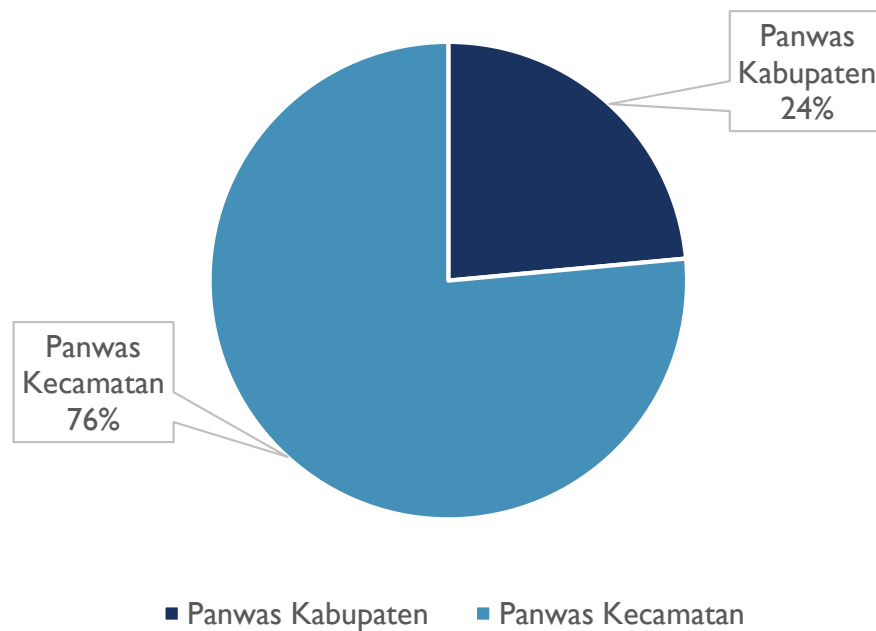
JUMLAH ANGGARAN PENGAWASAN BERDASARKAN JENIS BELANJA

- Belanja Honorarium :
Rp. 3.235.700.000
- Belanja Barang dan Jasa :
Rp. 3.906.475.000
- Jumlah Anggaran :
Rp. 7.142.175.000



JUMLAH ANGGARAN PENGAWASAN BERDASARKAN DISTRIBUSI

Distribusi Anggaran



- Panwas Kabupaten :
Rp. 1.677.565.000
- Panwas Kecamatan :
Rp. 5.452.910.000
- Jumlah Anggaran :
Rp. 7.130.475.000

JUMLAH PPL DAN PENGAWAS TPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPL	JUMLAH PTPS
1	ADIPALA	16	148
2	BANTARSARI	8	121
3	BINANGUN	17	116
4	CILACAP SELATAN	5	138
5	CILACAP TENGAH	5	148
6	CILACAP UTARA	5	125
7	CIMANGGU	15	175
8	CIPARI	11	117
9	DAYEUHLUHUR	14	118
10	GANDRUNGMANGU	14	182
11	JERUKLEGI	13	124
12	KAMPUNG LAUT	4	37

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPL	JUMLAH PTPS
13	KARANGPUCUNG	14	141
14	KAWUNGANTEN	12	139
15	KEDUNGREJA	11	133
16	KESUGIHAN	16	198
17	KROYA	17	174
18	MAJENANG	17	214
19	MAOS	10	81
20	NUSAWUNGU	17	147
21	PATIMUAN	7	86
22	SAMPANG	10	72
23	SIDAREJA	10	106
24	WANAREJA	16	177

JUMLAH ANGGARAN PENGAWASAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANGGARAN	NO	KECAMATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	ADIPALA	258.190.000	13	KARANGPUCUNG	243.050.000
2	BANTARSARI	198.280.000	14	KAWUNGANTEN	231.160.000
3	BINANGUN	242.685.000	15	KEDUNGREJA	221.965.000
4	CILACAP SELATAN	193.445.000	16	KESUGIHAN	290.690.000
5	CILACAP TENGAH	199.945.000	17	KROYA	280.385.000
6	CILACAP UTARA	184.995.000	18	MAJENANG	306.385.000
7	CIMANGGU	270.445.000	19	MAOS	182.870.000
8	CIPARI	211.565.000	20	NUSAWUNGU	262.835.000
9	DAYEUHLUHUR	228.100.000	21	PATIMUAN	170.235.000
10	GANDRUNGMANGU	269.700.000	22	SAMPANG	177.020.000
11	JERUKLEGI	226.705.000	23	SIDAREJA	199.120.000
12	KAMPUNG LAUT	126.100.000	24	WANAREJA	277.040.000



PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA HIBAH



DASAR

- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara.
- PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satker Pengelolaan APBN
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

PENGGUNAAN DANA HIBAH

- Batas tertinggi uang tunai penyimpanan di brankas Rp 50 juta per hari.
- Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun belanja pengeluaran.
- Semua pengeluaran harus di catat dalam BKU dan Buku Pembantu.

DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

- Buku Kas Umum
- Buku Pembantu:
 - BP Kas Tunai
 - BP Bank
 - BP Pajak
 - BP Lain-lain
 - Buku Pengawasan Anggaran Belanja/Karwas

KWITANSI

- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Honor
- Belanja Barang/Jasa

JENIS KUITANSI

KUITANSI HONOR/ BELANJA

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2016
 Mata Anggaran :
 Jenis Pengeluaran :

Terima Dari : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota
 Uang Sejumlah : **Rp**,-
 (..... Rupiah)

Untuk Keperluan : Pembayaran

Keterangan : Jumlah Kotor : Rp,-
 PPN :,- (Jika ada pajak terkait belanja)
 PPh Ps. 21 :,- (Jika ada pajak terkait belanja)

Jumlah Diterima : Rp,-

Menyetujui Kepala Sekretariat Panwas Kec.	Yang membayarkan PUMK Panwas Kec., 2016 Yang Menerima,
..... NIP. NIP.	Terlampir

KUITANSI PERJALANAN DINAS

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
 KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2016
 Kode Kegiatan :
 Jenis Pengeluaran : Perjalanan Dinas Biasa

Terima Dari : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota
 Uang Sejumlah : **Rp**,-
 (..... Rupiah)

Untuk Keperluan : Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Ke selama hari
 pada tanggal

Menyetujui Kepala Sekretariat Panwas Kec.	Yang membayarkan PUMK Panwas Kec., 2016 Yang Menerima,
..... NIP. NIP.	Terlampir

KUITANSI TOKO

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah _____

Untuk pembayaran _____

Rp. _____

METERAI
TEMPEL
TGL. 27
C0000AAC000000001
6000
ENAM RIBU RUPIAH



MATERAI

- Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.
- Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut:
 - Nominal sampai Rp. 250.000,- tidak dikenakan bea meterai
 - Nominal antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 1.000.000,- dikenakan bea meterai Rp. 3.000,-
 - Nominal diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan bea meterai Rp. 6.000,-

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=meterai>

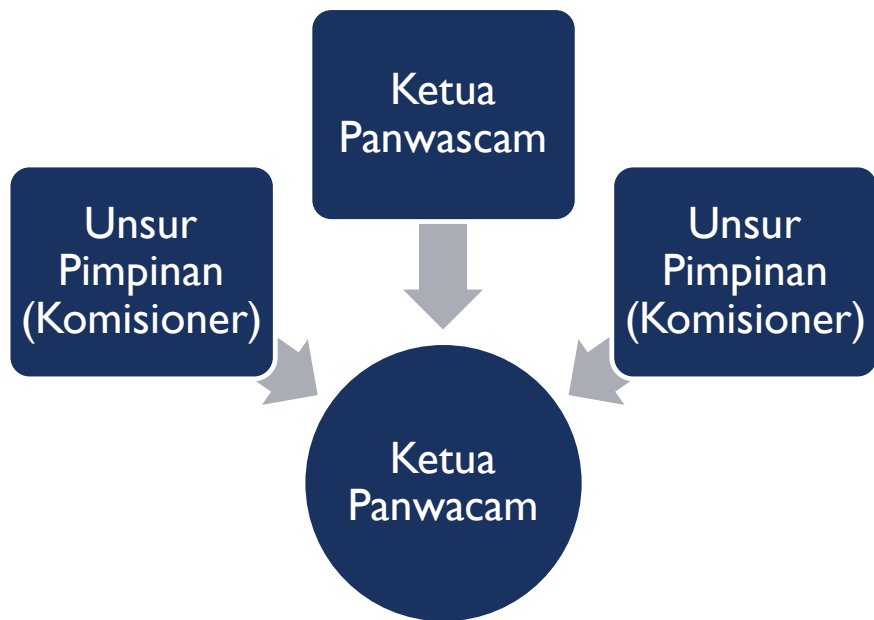
BELANJA PERJALANAN DINAS

SPJ PENDUKUNG:

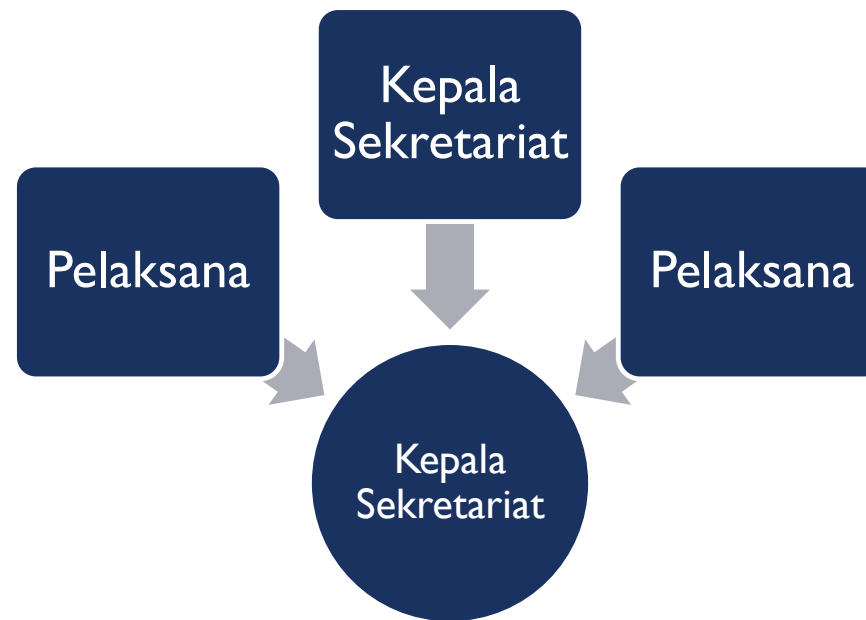
- SPT
- SPPD
- Kwitansi dan Perincian Biaya Perjadin
- Laporan/Nota Dinas
- Dokumentasi

SURAT PERINTAH TUGAS

PENANDATANGAN SPT

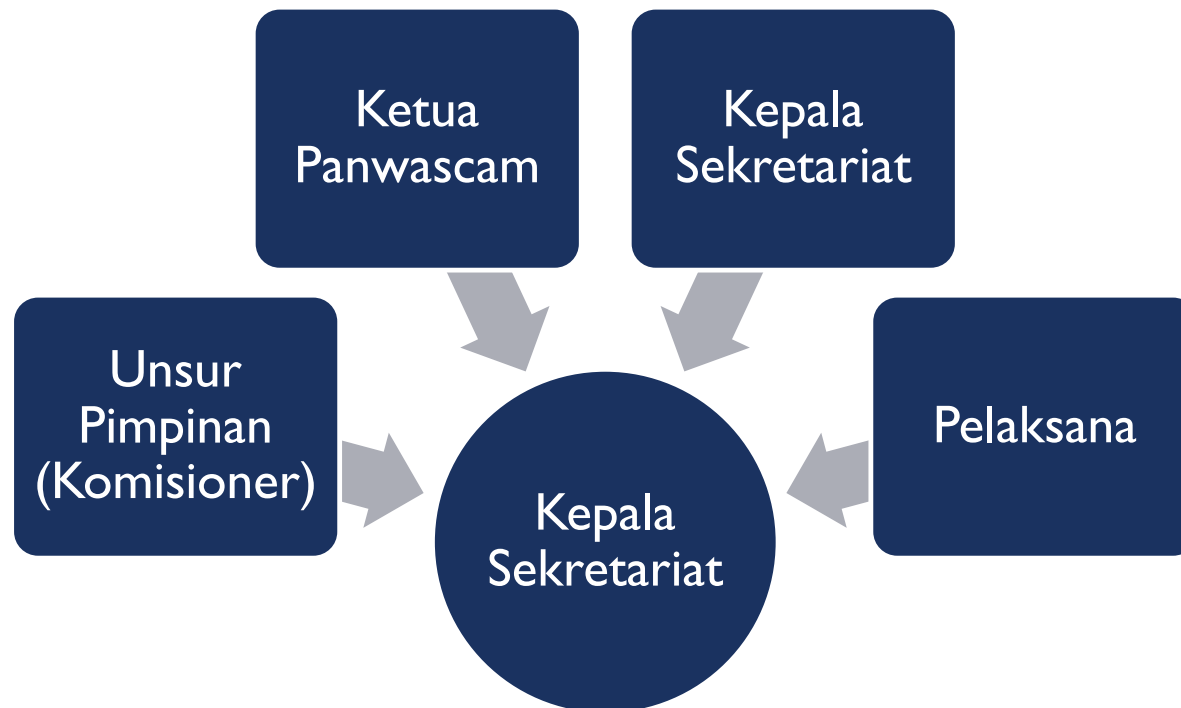


PENANDATANGAN SPT



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

PENANDATANGAN SPPD



BELANJA HONORARIUM

SPJ Pendukung:

- Kwitansi Belanja Honor
- Surat Keputusan
- Tanda Terima Honor

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANWAS KABUPATEN CILCAP BULAN AGUSTUS 2016					Tahun Anggaran : 2016 Nomor BuKi : /Bawaslu.Prov-JT-07/DX/2016 Mata Anggaran :			
NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	JUMLAH PENERIMAAN			TANDA TANGAN
					JUMLAH PENERIMAAN KOTOR	POTONGAN PPh.21	JUMLAH PENERIMAAN BERSIH	
1	TESTYANA INTANI, S.STP, M.SI NIP. 198611242004122001	Penata/ IIIc	Kepala Sekretariat	SK Bawaslu Prov 54 Kep Tahun 2016 Tanggal 26 Mei 2016				1
2	IRNI ISRIANA SARI, SE NIP. 19800611 200312 2 007	Penata Tk. I/ IIIId	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SK Bawaslu Prov70 Kep Tahun 2016 Tanggal 03 Agustus 2016				2
3	RUSYANTORO NIP. 19691108 198903 1 003	Penata Muda Tk. I/ IIIIb	Pelaksana	01 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016				3
4	YUSUF NURROHMAN NIP. 19850216 200312 1 003	Pengatur Tk I / IIId	Pelaksana	01 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016				4
5	AGUS TRIYANTO, A.Md NIP. 19850804 201001 1 016	Pengatur Tk I / IIId	Pelaksana	08 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Agustus 2016				5
6	IMAM SAPII NIP. 19831030 201406 1 002	Pengatur Muda/ IIIa	Pelaksana	01 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016				6
7	ACHMAD CHAFID, S.Pd.I	-	Tenaga Pendukung Non PNS	01 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016				7
8	IMAM SUPARDI	-	Tenaga Pendukung Non PNS	01 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016				8
9	RIZATMOKO NUGRAHATAMA	-	Tenaga Pendukung Non PNS	01 Kep Tahun 2016 Tanggal 10 Juni 2016				9

SPJ RAPAT / BIMTEK/ RAKOR

SPJ Pendukung:

- Kwitansi
- Daftar Hadir
- Undangan
- Notulensi
- Dokumentasi

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS MEKANISME PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2017 UNTUK PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

Hari / tanggal : Rabu, 21 September 2016
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Sumekar Setda Kabupaten Cilacap

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ADIPALA	MUDASIR, S. Sos	KETUA	1
2		IRWAN ARIANTO, S.STP, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	2
3		TABAH BANGUN WIDODO, SH	PUMK	3
4	BANTARSARI	NGADINO	KETUA	4
5		MARYOTO	KEPALA SEKRETARIAT	5
6		SARTONO, SE	PUMK	6
7	DAYEUHLUHUR	Dra. ENUNG NURHAYATI	KETUA	7
8		ADIL SUBEKTI	KEPALA SEKRETARIAT	8
9		TIRTONO	PUMK	9

DASAR PEMOTONGAN PAJAK

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

BELANJA HONORARIUM

- PPh Pasal 21
 - Komisioner Panwas Kecamatan;
 - 5% : Jika mempunyai NPWP
 - 6% : Jika tidak mempunyai NPWP
 - PPL : 3%
 - Pengawas TPS : 5%

BELANJA JASA

- PPh Pasal 23
 - CATERING : 2%
 - FOTOCOPY / PENGGANDAAN : 2%

BELANJA ATK

■ PAJAK

- Dibawah 1 Juta : Tidak Kena Pajak
- Belanja 1 Juta s.d. 2 Juta : Kena PPN
- Belanja diatas 2 Juta : Kena PPN dan PPh Ps. 22